

**PRA PROSES PEMBUATAN E-KTP
Studi Kasus tentang Strategi
Pelayanan Publik Bidang Informasi Kependudukan
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Kapuas Hulu**

Bls.P.Castro Yan Stur

Program Studi Ilmu Pemerintahan Kerjasama Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura
dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat

E-mail :castro_pido@yahoo.com

Abstrak

Penulisan Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis masalah yang menurut pengamatan awal penulis berpengaruh terhadap pelaksanaan pembuatan dan pelayanan e-KTP seperti terdapat kesalahan data penduduk terutama pada pendataan Kepala Keluarga (KK), beberapa masalah teknis dalam pengoperasian perangkat e-KTP, misalnya kemampuan daya listrik tidak mencukupi untuk pengoperasian, permasalahan lain yang muncul ialah berkaitan dengan keadaan geografis Kabupaten Kapuas Hulu yang memiliki 23 Kecamatan dan 278 desa sehingga jarak tempuh yang diperlukan sangat jauh antar kecamatan maupun dari desa ke kecamatan. Penelitian ini menggunakan perspektif metode penelitian kualitatif dan menggunakan jenis penelitian deskriptif.

Kesimpulan dari penelitian ini ialah belum optimalnya pelayanan publik yang berkaitan dengan pendataan penduduk, sehingga pemuktahiran data penduduk mengalami kendala. Hal tersebut berakibat pada tidak akuratnya data Kartu Keluarga (KK) undangan pemanggilan penduduk wajib KTP.

Kata kunci (*Keyword*): Pra Proses, Pelayanan Publik, Kartu Tanda Penduduk Elektronik.

Abstrac

The writing of this thesis intended to find out and analyze the problems according to writer's first observation about the implementation of Electronic Identity Card program such as the mistaken of peoples data including in People Administration card, technical problems and geographics condition of Kapuas Hulu Regency. This study uses qualitative research methods perspective and use descriptive research.

The conclusion of this study is the public service especially about the peoples data is not optimal so that makes a problem during data perfection and it cause a mistake in peoples data and invitation for the electronic identity card.

Keywords: Pre-Process, Public Services, Electronic Identity Card.

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Penelitian

Dalam era otonomi daerah terdapat beberapa kebijakan dari Pemerintah Pusat yang harus dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah, contohnya kebijakan pelaksanaan program Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP). Kabupaten Kapuas Hulu dalam hal ini merupakan salah satu daerah yang ditunjuk oleh pemerintah pusat sebagai daerah yang menerapkan e-KTP tahun 2012. Untuk itu implementasinya perlu disukseskan bersama-sama sehingga sasaran dapat dicapai sesuai dengan tahap dan waktu yang telah ditetapkan.

KTP (Kartu Tanda Penduduk) dahulunya pada tahun 1978, KTP terbuat dari blanko kertas dan laminasi plastik yang relatif tidak tahan lama, photo diletakkan lem, tandatangan/cap jempol, data tercetak dengan komputer/mesin tik, berlaku ditiap kabupaten/kota, kemudian berubah pada tahun 2004 KTP nasional dengan spesifikasi photo dicetak pada kartu, tandatangan / cap jempol, data tercetak dengan komputer, berlaku nasional, tahan lebih lama (tidak mudah lecek), dan pada tahun 2009 berubah lagi menjadi e-KTP(Elektronik Kartu Tanda Penduduk)dengan spesifikasi Photo dicetak pada kartu, bahan terbuat dari PVC/PC, data terceteak dengan komputer, berlaku nasional, mampu menyimpan data, scanning photo dan tanda tangan/cap jempol,data dibaca/ditulis dengan *card Reader*, terdapat *microchips* sebagai media penyimpan data, menyimpan data *finger print biometric* sebagai satu *uniq identificaton personal*, Mampu menampung seluruh data personal yang

diperlukan dalam multi aplikasi. (sumber : [disdukcapil pinrangkab](#), 2013)

Tujuan utama penyelenggaraan administrasi kependudukan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang No.23 tahun 2006 adalah terwujudnya tertib database Kependudukan, tertib penertiban Nomor Induk Kependudukan (NIK), Tertib dokumen kependudukan. Untuk mewujudkan tujuan utama penyelenggaraan administrasi kependudukan tersebut, perlu penerapan Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang berbasis NIK secara nasional (KTP Elektronik) untuk setiap penduduk wajib KTP. Peraturan Presiden Nomor 26 tahun 2009 tentang penerapan KTP berbasis NIK secara nasional sebagaimana telah diubah dengan per turan presiden nomor 35 tahun 2010, antara lain mengamanatkan bahwa penerapan e-KTP sudah harus selesai selambat-lambatnya akhir tahun 2012(jurnal kependudukan dan pencatatan sipil:2011).

Untuk merealisasikan amanat Peraturan Presiden dimaksud, maka pemerintah melaksanakan program nasional penerapan e-KTP di 197 Kabupaten/Kota pada tahun 2011 dan di 300 Kabupaten/Kota pada tahun 2012. Program Nasional penerapan e-KTP tersebut menjadi kewajiban dan tanggung jawab bersama antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah Kabupaten/Kota (Sumber: Jurnal Kependudukan dan Pencatatan Sipil).

Luas wilayah Kabupaten Kapuas Hulu 29.842 km² dengan kepadatan penduduk sekitar delapan jiwa per kilometer persegi. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (disdukcapil)

Kabupaten Kapuas Hulu mulai melakukan Presiden No. 35 Tahun 2010 tentang Penerapan Kartu perekaman e-KTP pada 26 Juli 2012 yang Tanda Penduduk berbasis Nomor Induk Kependudukan dilaksanakan di setiap Kecamatan. Target waktu secara Nasional. Bedanya dengan penelitian penulis yang diberikan pusat selama 120 hari. Tidak dalam desain penelitian studi kasus sehingga penulis sampai 120 hari, Disdukcapil Kapuas Hulu beranggapan judul penelitian penulis orijinal. mampu menyelesaikan jumlah target yang diberikan, yaitu pada 23 Oktober (sumber harian equator : 2012).

Dalam pra proses pembuatan e-KTP terdapat beberapa masalah yang menurut pengamatan penulis berpengaruh terhadap kesuksesan pelaksanaan pembuatan dan pelayanan e-KTP seperti terdapat kesalahan data penduduk terutama pada pendataan Kepala Keluarga (KK), beberapa masalah teknis dalam pengoperasian perangkat e-KTP, misalnya kemampuan daya listrik tidak mencukupi untuk pengoperasian, permasalahan lain yang muncul ialah berkaitan dengan keadaan geografis Kabupaten Kapuas Hulu yang memiliki 23 Kecamatan dan 278 desa sehingga jarak tempuh yang diperlukan sangat jauh antar kecamatan maupun dari desa ke kecamatan. (Sumber : Bidang Informasi Kependudukan).

Beranjak dari fakta di atas, peneliti menjadi tertarik untuk meneliti pra proses pelaksanaan pembuatan e-KTP di Kabupaten Kapuas Hulu. Berdasarkan penelusuran di keustakaan Prodi IP penulis menemukan penelitian terdahulu oleh Christian Suganda Bayu Patra (2012) dengan judul "Implementasi Peraturan Presiden No. 35 Tahun 2010 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk berbasis Nomor Induk Kependudukan secara Nasional di Kecamatan Ngabang Kabupaten Landak", penulisan skripsi ini dimaksudkan untuk mencari solusi dari pemecahan masalah yang dihadapi oleh pemerintah kecamatan ngabang khususnya dan pemerintah kabupaten landak umumnya terkait proses Implementasi Peraturan

Perumusan dan Identifikasi Masalah

Perumusan masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian di atas, maka perumusan penelitian ini berikut : "Bagaimanakah strategi pelayanan Publik bidang informasi kependudukan dalam pra proses perekaman e-KTP?"

Identifikasi Masalah

Berdasarkan perumusan masalah di atas, maka dapat diidentifikasi masalah penelitian berikut :

Bagaimana hambatan yang dihadapi bidang informasi kependudukan dalam pra proses perekaman e-KTP?

Bagaimana strategi pelayanan Publik bidang informasi kependudukan dalam pra proses perekaman e-KTP ?

Maksud dan Tujuan Penelitian

Adapun maksud dan tujuan penulis melakukan penelitian ini untuk mengetahui dan memahami fenomena berikut :

Mengetahui dan memahami hambatan yang dihadapi bidang informasi kependudukan dalam pra proses perekaman e-KTP.

Mengetahui dan memahami strategi pelayanan Publik bidang informasi kependudukan dalam pra proses perekaman e-KTP.

Kegunaan Penelitian

Aspek Teoritik

Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan ilmiah terhadap perkembangan pengetahuan ilmu sosial dan ilmu politik, secara khusus ilmu pemerintahan yang berhubungan dengan strategi pelayanan publik.

Aspek Praktis

Bagi Pemerintah Daerah

Secara Praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi pemerintah daerah untuk lebih maksimal lagi dalam pelaksanaan pelayanan e-KTP di setiap kecamatan.

Bagi Peneliti

Secara Praktis, sebagai sarana menambah wawasan dan ilmu pengetahuan, serta sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan skripsi.

KERANGKA TEORI DAN METODOLOGI

1. Kerangka Teori

Teori Tindakan Sosial

Teori tindakan sosial ini adalah teori yang berasal dari paradigma definisi sosial yang dikemukakan oleh Weber. Paradigma ini mengartikan sosiologi sebagai studi tentang tindakan sosial antar hubungan sosial. Kedua hal itulah yang menurutnya menjadi pokok persoalan sosiologi. Intinya adalah "*tindakan yang penuh arti*" dari individu yang dimaksudkannya dengan

tindakan sosial itu adalah tindakan individu sepanjang tindakannya itu mempunyai makna atau arti subyektif bagi dirinya dan diarahkan kepada tindakan orang lain. Sebaliknya tindakan individu yang diarahkan kepada benda mati atau objek fisik semata tanpa dihubungkannya dengan tindakan orang lain bukan merupakan tindakan sosial.

Dalam kaitanya dengan penelitian ini adalah tindakan sosial yang dilakukan oleh aparatur baik disdukcapil, Kecamatan, maupun Desa mempunyai makna subyektif bagi aparatur itu sendiri dan diarahkan kepada masyarakat. Makna subyektif yang dimaksud adalah tindakan nyata berupa pelayanan yang diberikan aparatur kepada masyarakat.

2.1.2 Konsep Strategi Pelayanan Bidang Informasi Kependudukan

Strategi merupakan alat untuk mencapai tujuan dan dalam perkembangannya konsep mengenai strategi terus berkembang. Hal ini dapat ditunjukkan oleh adanya perbedaan konsep mengenai strategi selama 30 tahun terakhir. Dalam perkembangannya Menurut Salusu (1996:101) Strategi adalah suatu seni menggunakan kecakapan dan sumber daya suatu organisasi untuk mencapai sasarannya melalui hubungannya yang efektif dengan lingkungan dalam kondisi yang paling menguntungkan.

Menurut Porter strategi adalah suatu alat yang sangat penting

untuk mencapai keunggulan bersaing. Senada dengan itu, Hamel dan Pharalad juga mengatakan strategi merupakan tindakan yang bersifat incremental (senantiasa meningkat) dan terus-menerus, dilakukan berdasarkan sudut pandang tentang apa yang diharapkan oleh pelanggan di masa depan (Rangkuti, 2004:4).

Menurut Osborne (2001) dalam Ismail (2010:25) terdapat lima strategi dalam meningkatkan kinerja pelayanan publik, yakni *Core Strategy*, *Consequences strategy*, *costumer strategy*, *control strategy*, dan *culture strategy*.

Strategi Inti (*Core Strategy*) bertujuan memperjelas misi dan visi organisasi. Visi dan Misi memang sangat penting sebagai pedoman jangka panjang akan kemana sebuah organisasi akan diarahkan dengan memperhatikan berbagai aspek yang menjadi tugas pokok dan fungsinya serta memperhatikan perkembangan lingkungan strategis.

Strategi Konsekuensi (*Consequences strategy*) bertujuan untuk menciptakan kondisi agar terjadi persaingan yang sehat di antara penyelenggara pelayanan publik yang lain.

Strategi Pelanggan (*Costumer strategy*) bertujuan menciptakan sistem penyelenggaraan pelayanan yang dilaksanakan oleh birokrat. Sehingga mampu memberikan tingkat pelayanan yang optimal bagi masyarakat.

Strategi Pengawasan (*Control strategy*) dimaksudkan untuk menciptakan

kemampuan dan kemandirian serta kepercayaan masyarakat terhadap kantor pemerintahan sebagai institusi pelayanan publik dan pegawai/karyawan sebagai pelayan masyarakat.

Strategi Budaya (*Culture strategy*) bertujuan untuk mengubah budaya yang dapat menghalangi ke arah suatu perubahan. Dengan kata lain, budaya yang berorientasi pada status quo harus dapat diubah menjadi budaya yang terbuka terhadap suatu perubahan.

Dari penjelasan kelima strategi di atas penulis membatasi atau memfokuskan kepada Strategi Pelanggan (*Costumer strategy*). Dengan maksud untuk mengetahui bagaimanakah Strategi Pelanggan (*Costumer strategy*) di laksanakan dalam pelayanan e-KTP di Disdukcapil Kabupaten Kapuas Hulu, sehingga bisa menghasilkan strategi pelanggan yang optimal atau prima ditunjukkan pada beberapa dimensi atau atribut yang harus diperhatikan dalam peningkatan kualitas pelayanan menurut Gespersz (1997:2) dalam Hardiyansyah (2011:51), yaitu :

1. Ketepatan waktu pelayanan;
2. Akurasi pelayanan ;
3. Kesopanan dan keramahan dalam memberikan pelayanan;
4. Tanggungjawab yang berkaitan dengan penerimaan pesanan, maupun penanganan keluhan;
5. Kelengkapan, menyangkut ketersediaan sarana pendukung;
6. Kemudahan dalam mendapatkan pelayanan;

7. Variasi model pelayanan, berkaitan dengan inovasi;
8. Pelayanan pribadi, berkaitan dengan fleksibilitas/penanganan permintaan khusus;
9. Kenyamanan dalam memperoleh pelayanan, berkaitan dengan lokasi, ruang, kemudahan dan informasi;
10. Atribut yaitu pendukung pelayanan lainnya seperti kebersihan lingkungan, AC, fasilitas ruang tunggu, fasilitas musik atau TV, dan sebagainya.

2. Metode Penelitian

Dalam penelitian tentang Pembuatan e-KTP di Kabupaten Kapuas Hulu Studi kasus tentang Strategi Pelayanan Bidang Informasi Kependudukan dalam pra proses pembuatan e-KTP di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atas kebijakan pemerintah melalui Kemendagri berdasarkan UU No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Peraturan Presiden No.35 tahun 2010 tentang perubahan atas peraturan presiden No.26 tahun 2009 tentang penerapan KTP berbasis Nomor Induk Kependudukan secara Nasional, Peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif.

Adapun menurut Bogdan dan Taylor (dalam Moleong 2010:9) mendefinisikan metodologi kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian Kualitatif pada hakikatnya ialah mengamati orang dalam lingkungan hidupnya, berinteraksi dengan mereka, berusaha memahami bahasa dan tafsiran mereka tentang dunia sekitarnya (Nasution,1988:5).

Jenis Penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif. Menurut Suryabrata (2010:76) Secara Harfiah, Penelitian deskriptif adalah penelitian yang bermaksud untuk membuat pencandraan (deskripsi) Mengenai situasi-situasi atau kejadian-kejadian. Melalui metode penelitian deskriptif, peneliti berusaha mendeskripsikan atau menggambarkan secara terperinci dan mendalam mengenai strategi pada bidang informasi kependudukan dalam pra proses pembuatan e-KTP.

B. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Kemampuan Menggerakkan dalam Perencanaan, Pelaksanaan, dan Pemeliharaan Hasil-Hasil Pembangunan

Peran menggerakkan atau memotivasi yaitu berkaitan dengan pemberian dorongan kepada pegawai untuk bekerja lebih giat. Hubungan pengaruh dan motivasi adalah kalau peran mempengaruhi efektif, maka peran memotivasi akan mudah dilakukan, sebaliknya jika pemimpin tidak mampu menanamkan pengaruh terhadap bawahannya, maka sulit baginya untuk melakukan motivasi. (Pasolong, 2008:34).

Untuk menggerakkan masyarakat agar mau berpartisipasi dalam pembangunan, ada beberapa hal yang perlu dilakukan oleh

Kepala Desa antara lain yaitu:

- 1) Mengikutsertakan masyarakat dalam pengambilan keputusan.
- 2) Berusaha melengkapi sarana dan prasarana yang menunjang proses pelaksanaan pembangunan.
- 3) Mendukung dan mendorong inisiatif baik yang timbul dari masyarakat.

- 4) Berusaha melibatkan dan mengerahkan semua masyarakat.

Sehubungan dengan hal di atas, maka berdasarkan hasil wawancara dan observasi penulis selama di lapangan mengenai kemampuan Kepala Desa dalam menggerakkan masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pemeliharaan hasil-hasil pembangunan di Desa Timpuk adalah kemampuan Kepala Desa dalam menggerakkan masyarakat masih kurang baik dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pemeliharaan hasil-hasil pembangunan di Desa Timpuk. Upaya Kepala Desa sebagai pemimpin dalam menggerakkan masyarakat belum dilaksanakan secara optimal, sehingga masih kurang mampu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa.

2. Kemampuan Mempengaruhi dalam Perencanaan, Pelaksanaan, dan Pemeliharaan Hasil-Hasil Pembangunan

Kepemimpinan adalah kegiatan untuk mempengaruhi orang-orang agar mau bekerjasama untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Menurut Pasolong (2008:33) peran mempengaruhi berguna untuk memberi pengaruh kepada bawahan agar mau bekerjasama dalam merealisasikan suatu program. Untuk itu, ada beberapa hal yang perlu dilakukan oleh Kepala Desa untuk mempengaruhi masyarakatnya antara lain:

- 1) Melakukan komunikasi dengan jelas dan baik.
- 2) Kegiatan mempengaruhi masyarakat dengan musyawarah.

- 3) Kegiatan mempengaruhi masyarakat melalui pengarahannya atau komunikasi pada upacara-upacara keagamaan/adat.

- 4) Mempengaruhi masyarakat dengan jalan menjelaskan manfaat-manfaat pembangunan.

Sehubungan dengan hal di atas, berdasarkan hasil wawancara dan observasi penulis selama di lapangan mengenai kemampuan Kepala Desa dalam mempengaruhi masyarakat sebagai berikut.

Menurut analisis penulis, bahwa Kepala Desa kurang bersosialisasi dengan masyarakatnya. Kepala Desa lebih sibuk dengan pekerjaannya, sehingga tidak banyak kesempatan untuk turun ke masyarakat. Kepala Desa lebih sering memerintah kepada aparatnya dalam hal ini Sekretaris Desa untuk mewakili dirinya. Hal ini juga didukung dari hasil wawancara dengan beberapa warga yaitu Bapak Paternus (62) dan Benyamin (28) yang mengatakan bahwa Kepala Desa jarang turun secara langsung ke lapangan. Selanjutnya, menurut penulis selain disebabkan oleh pekerjaan, jarang Kepala Desa turun secara langsung ke lapangan disebabkan oleh kondisi jalan yang rusak dan luasnya wilayah Desa Timpuk sehingga sulit untuk berpergian sebagaimana yang diungkapkan oleh Kepala BPD bahwa Desa Timpuk sangat luas yang terdiri dari 8 dusun dan merupakan sebuah tantangan untuk membangunnya. Menurut Beliau perlu adanya pemekaran wilayah Desa Timpuk. Ide pemekaran sudah lama diajukan pada tahun 2011 ke tingkat kabupaten baik ke Dewan Perwakilan Rakyat Daerah maupun

ke Pemerintah Daerah Kabupaten Sekadau, namun belum ada tanggapan dari pihak Pemerintahan Daerah Kabupaten Sekadau.

3. Kemampuan Mengatur dan Mengarahkan dalam Perencanaan, Pelaksanaan, dan Pemeliharaan Hasil-Hasil Pembangunan

Sumber daya yang telah dimaksimalkan akibat dari kemampuan pimpinan dalam menggerakkan dan mempengaruhi pengikutnya selanjutnya memerlukan kemampuan pimpinan untuk mengatur dan mengarahkan agar sumber daya yang ada dan potensi yang dimiliki bisa bermanfaat semaksimal mungkin sehingga tercapainya tujuan dengan efektif dan efisien. Oleh sebab itu, kemampuan Kepala Desa dalam mengatur dan mengarahkan semua kegiatan yang menunjang tercapainya tujuan atau dalam hal ini untuk efektifnya tujuan pembangunan ada beberapa hal yang perlu diperhatikan antara lain, yaitu:

- 1) Mengfungsikan semua personil yang menunjang kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- 2) Membuat perencanaan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
- 3) Mengalokasikan dana yang ada sesuai dengan kebutuhan.
- 4) Membuat jadwal pembangunan.
- 5) Melaksanakan kegiatan pembangunan sesuai dengan jadwal dan perencanaan.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi penulis selama di lapangan mengenai

kemampuan Kepala Desa dalam mengatur dan mengarahkan masyarakat adalah sebagai berikut.

Menurut analisis penulis Kepala Desa kurang memperhatikan jadwal kegiatan pembangunan, karena menurut informasi yang diperoleh dari wawancara dengan Kepala BPD dan warga bahwa pelaksanaan pembangunan seringkali terlambat dari jadwal yang telah ditetapkan, bahkan penyelesaiannya tidak sesuai dengan jadwal sehingga hasilnya pun terkadang tidak sesuai dengan yang diharapkan. Menurut Benyamin (28) bahwa pelaksanaan pembangunan, misalnya pembangunan jembatan bahan material yang digunakan biasa di ganti dengan kualitas yang rendah. Tetapi menurut wawancara yang dilakukan dengan Kepala Desa, pelaksanaan kegiatan pembangunan sering tidak sesuai dengan jadwal dikarenakan keterbatasan dana dan swadaya dari masyarakat sehingga pembangunan sering terbengkalai. Oleh karena itu, Kepala Desa biasanya melibatkan pihak ketiga dalam pembangunan, sehingga pembangunan dapat terselesaikan tetapi konsekuensinya pada hasil pembangunan yang kurang berkualitas.

Perencanaan dan pelaksanaan pembangunan masih belum sesuai dengan dengan rencana dan kebutuhan masyarakat, hal ini disebabkan karena keterbatasan dana yang dimiliki oleh pihak desa dan bantuan yang diberikan oleh pihak pemerintah daerah. Pemerintah Daerah Kabupaten Sekadau juga memiliki keterbatasan dana sehingga program-program pembangunan yang diusulkan oleh pemerintah desa banyak yang dipangkas sesuai dengan keuangan daerah dan skala prioritas.

Selanjutnya, dalam pemeliharaan hasil-hasil pembangunan di Desa Timpuk ini masih kurang kesadaran dari masyarakat dan kurang berperannya Kepala Desa dan perangkat desa lainnya dalam mengatur dan mengarahkan masyarakat. Sebagaimana yang diungkapkan oleh warga setempat bahwa Kepala Desa tidak ada membuat jadwal kegiatan kerja bakti di desa. Tetapi menurut hasil wawancara dengan Kepala Desa dan Sekretaris Desa bahwa sangat sulit untuk mengajak warga kerja bakti karena warga lebih sibuk mencari nafkah atau bekerja, apalagi tuntutan biaya hidup yang semakin tinggi.

4. Faktor-Faktor Penyebab Belum Berperannya Kepala Desa dalam Pembangunan

Berdasarkan analisis permasalahan yang telah terkumpul dari hasil wawancara dan observasi penulis selama di lapangan dapat dikemukakan beberapa faktor yang menyebabkan belum berperannya Kepala Desa dalam pembangunan di Desa Timpuk Kecamatan Sekadau Hilir Kabupaten Sekadau antara lain:

1. Peranan Kepala Desa yang belum optimal disebabkan kemampuan berkomunikasi dengan masyarakat masih kurang.
2. Tingkat keterampilan dan pendidikan aparatur desa juga masih kurang. Rata-rata tingkat pendidikan aparatur desa hanya sampai jenjang pendidikan tingkat Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Atas (SMA).
3. Luasnya wilayah Desa Timpuk yang mencapai 135,22 km² dan merupakan desa terluas di Kabupaten Sekadau dengan 8

dusun dan kondisi medan yang berat atau akses transportasi yang kurang layak untuk ditempuh dan jauh antar dusun-dusun sehingga menghambat Kepala Desa dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dan menampung permasalahan masyarakat yang berkaitan dengan pembangunan.

4. Tingkat penghasilan masyarakat yang relatif masih rendah dan pekerjaan banyak yang memerlukan waktu penuh hari, sehingga sulit bagi mereka untuk terlibat dalam pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah desa.

C. Simpulan dan Keterbatasan

1. Simpulan

Berdasarkan pembahasan pada bab sebelumnya, maka penulis dapat mengemukakan kesimpulan sebagai berikut.

Peranan Kepala Desa dalam pembangunan di Desa Timpuk Kecamatan Sekadau Hilir Kabupaten Sekadau belum optimal. Hal ini terlihat dari:

- a. Kemampuan Kepala Desa menggerakkan masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pemeliharaan hasil-hasil pembangunan masih rendah.
- b. Kemampuan Kepala Desa mempengaruhi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pemeliharaan hasil-hasil pembangunan masih tergolong rendah dari segi komunikasi dengan masyarakat namun

kemampuan mempengaruhi aparatur desa sudah cukup optimal.

- c. Kemampuan Kepala Desa mengatur dan mengarahkan masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pemeliharaan pembangunan dapat dikategorikan masih rendah.

Faktor-Faktor penyebab belum optimalnya peranan Kepala Desa dalam pembangunan di Desa Timpuk Kecamatan Sekadau Hilir Kabupaten Sekadau adalah sebagai berikut:

- a. Kemampuan komunikasi Kepala Desa yang masih kurang dengan masyarakat.
- b. Tingkat keterampilan dan pendidikan aparatur desa juga masih kurang, rata-rata tamatan Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Atas (SMA).
- c. Luasnya wilayah Desa Timpuk yang mencapai 135,22 km² dan merupakan desa terluas di Kabupaten Sekadau dengan 8 dusun dan kondisi medan yang berat atau akses transportasi yang kurang layak untuk ditempuh dan jauh antar dusun-dusun sehingga menghambat Kepala Desa dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dan menampung permasalahan masyarakat yang berkaitan dengan pembangunan.
- d. Tingkat penghasilan masyarakat yang relatif masih rendah dan pekerjaan banyak yang memerlukan waktu penuh hari, sehingga sulit bagi mereka untuk terlibat dalam pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah desa.

2. Keterbatasan

Keterbatasan-keterbatasan penelitian yang penulis alami sebagai berikut.

1. Kondisi jalan yang rusak dan tidak bisa dilewati kalau terjadi hujan karena jalan masih berupa tanah kuning yang belum dilakukan pengerasan menyebabkan peneliti mengalami kendala dalam menuju lokasi penelitian.
2. Waktu penelitian yang sangat terbatas, dikarenakan izin yang diberikan oleh pihak pengasuh dan pengelola untuk melakukan penelitian dilapangan sangat singkat yakni hanya 12 (dua belas) hari.
3. Penulis merupakan peneliti pemula sehingga hasil penelitian kurang maksimal terutama dalam mengolah data dan melakukan wawancara sehingga penulis berharap ada peneliti-peneliti selanjutnya yang dapat memperbaiki dan menyempurnakan laporan penelitian ini. Di samping itu juga, kurang terbukanya informan terutama informan yang berasal dari jajaran pemerintahan desa.

D. Apresiasi

Pada kesempatan ini, saya mengucapkan terima kasih kepada pengasuh dan pengelola Program Studi Ilmu Pemerintahan kerjasama UNTAN dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dan jajaran Pemerintahan Desa Timpuk serta masyarakat Desa Timpuk yang terlibat dalam penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku

Adisasmita, Raharjo. 2006. *Membangun Desa Partisipatif*. Yogyakarta : Graha Ilmu.

Depdikbud Ri. 2012. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.

Kartono, Kartini. 2001. *Pemimpin dan Kepemimpinan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Sedarmayanti. 2004. *Good Governance (Kepemerintahan yang Baik) Bagian Dua*. Bandung: Mandar Maju.

Sugiyono. 2010. *Metodologi Penelitian Pendidikan : Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung : Alfabeta.

Tjokrowinoto, Moeljarto. 2007. *Pembangunan : Dilema dan Tantangan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar

Todaro, Michael P. 2000. *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga*, (alih bahasa : Haris Munandar). Jakarta: Erlangga.

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa

Website

<http://rinawahyu42.wordpress.com/2011/06/07/teori-peran-rhrole-theory> yang di akses pada tanggal 15 Maret 2013.



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS TANJUNGPURA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
PENGELOLA JURNAL MAHASISWA

Jalan A Yani Pontianak, Kotak Pos 78124
Homepage : <http://jurnalmahasiswa.fisip.untan.ac.id>
Email : jurnalmhs@fisip.untan.ac.id

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH/PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK JURNAL ELEKTRONIK MAHASISWA**

Sebagai sivitas akademika Universitas Tanjungpura, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama Lengkap : BLS.P.CASTRO YAN STUR
NIM / Periode lulus : E42009037/ 2013
Fakultas / Jurusan : FISIP / ILMU ADMINISTRASI
Email address/HP : castro_pido@yahoo.com/ 089657481386

demi pengembangan ilmu pengetahuan dan memenuhi syarat administrasi kelulusan mahasiswa (S1), menyetujui untuk memberikan kepada Pengelola Jurnal Mahasiswa Ilmu Administrasi pada Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non-Exclusive Royalti-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul :

PRA PROSES PEMBUATAN E-KTP

Studi Kasus tentang Strategi

Pelayanan Publik Bidang Informasi Kependudukan

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kabupaten Kapuas Hulu

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini, Pengelola Jurnal berhak menyimpan, mengalih-media/formatkan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di internet atau media lain :

fulltext

content artikel sesuai dengan standar penulisan jurnal yang berlaku.

untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/ pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak pengelola jurnal, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran hak cipta dalam karya saya ini.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Mengetahui/disetujui
Pengelola Jurnal..... 10/2014



H. Wijaya Kusuma, MA, Ph.D
NIP. 196202141986031001

Dibuat di : Pontianak
Pada Tanggal : 7 Februari 2014

(BLS.P.CASTRO YAN STUR)